

## Kajian Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Gorontalo

Muhammad Yusuf<sup>1\*</sup>, Fitriyane Lihawa<sup>2</sup>, Dewi Wahyuni K. Baderan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Institusi Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email : [\\*yusufalbukhary@gmail.com](mailto:*yusufalbukhary@gmail.com)<sup>1</sup>

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: [yusufalbukhary@gmail.com](mailto:yusufalbukhary@gmail.com)

**Abstract.** Human Resource Development (HRD) is one of the main priorities in realizing the progress of a region. The Human Development Index (HDI) is one of the indicators used to measure the quality of HRD. This study aims to analyze the quality of HRD in Gorontalo Province using the HDI as the main indicator. Secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) were analyzed to measure three dimensions of the HDI, namely health, education, and decent living standards during the period 2019-2023. The results of the study showed an increasing trend in the HDI across all regions, although at varying rates. Gorontalo City recorded the highest HDI value, reflecting better development quality compared to other districts. Meanwhile, North Gorontalo had the lowest HDI, although there was an increase from year to year. Further analysis showed that significant disparities in the dimensions of health, education, and per capita expenditure between urban and rural areas were major challenges. This study suggests the need for equitable development through increasing access to health services, quality education, and economic infrastructure to reduce disparities between regions. These findings are expected to contribute to more inclusive policy-making for HRD development in Gorontalo Province.

**Keywords:** HDI, health, education, HDR

**Abstrak.** Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemajuan suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas SDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas SDM di Provinsi Gorontalo menggunakan IPM sebagai indikator utama. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dianalisis untuk mengukur tiga dimensi IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak selama periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan tren IPM di seluruh wilayah, meskipun dengan laju yang bervariasi. Kota Gorontalo mencatat nilai IPM tertinggi, mencerminkan kualitas pembangunan yang lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Sementara itu, Gorontalo Utara memiliki IPM terendah, meskipun ada peningkatan dari tahun ke tahun. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa disparitas signifikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyarankan perlunya pemerataan pembangunan melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan yang lebih inklusif bagi pembangunan SDM di Provinsi Gorontalo.

**Kata kunci:** IPM, kesehatan, pendidikan, SDM

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemajuan suatu negara. SDM yang berkualitas menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Awalia & Husnurrosyidah, 2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas SDM melalui tiga dimensi utama, yaitu

umur panjang dan hidup sehat, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup layak (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). IPM yang tinggi mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang berkualitas (Fahrurozi, et al, 2023).

Dimensi pertama dari IPM, yaitu kesehatan, menjadi fondasi penting dalam pembangunan SDM (Jasasila, 2020). Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk menjalani hidup yang produktif dan berkontribusi pada aktivitas ekonomi (Novitasari, Suharno, & Arintoko, 2021). Studi yang dilakukan oleh Muslimin & Nursinah (2023) menunjukkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan berkorelasi positif dengan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam sektor kesehatan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas SDM di suatu wilayah (Muslimin & Nursinah, 2023).

Dimensi kedua, yaitu pendidikan, memainkan peran sentral dalam membentuk kemampuan, keterampilan, dan inovasi tenaga kerja (Mustaqim & Fauzi, 2022). Pendidikan yang berkualitas membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya (Kapisa, Bauw, & Yap, 2021). Penelitian oleh Astuti (2020) menemukan bahwa kualitas pendidikan memiliki dampak langsung pada tingkat produktivitas ekonomi dan pengurangan pengangguran. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi langkah kritis dalam membangun SDM yang berdaya saing global (Astuti, 2020).

Dimensi terakhir, yaitu standar hidup layak, berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Indriani, 2020). Tingkat pendapatan yang mencukupi memungkinkan individu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan, yang menjadi dasar untuk hidup bermartabat (Izah & Hendarti, 2021). Studi oleh Putri & Putri (2021) menunjukkan bahwa standar hidup yang layak tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Putri & Putri, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana kondisi kualitas SDM di Provinsi Gorontalo berdasarkan indikator IPM serta ketiga dimensi pembentuk IPM. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana kondisi kualitas SDM di Provinsi Gorontalo berdasarkan indikator IPM dan ketiga dimensi pembentuk IPM?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kualitas SDM di Provinsi Gorontalo berdasarkan indikator IPM dan ketiga dimensi pembentuk IPM. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai

kondisi kualitas SDM di Provinsi Gorontalo, serta memberikan masukan untuk kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Provinsi Gorontalo.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM menghitung harapan hidup saat lahir untuk mengukur kesehatan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah untuk pendidikan, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita untuk mencerminkan standar hidup. UNDP merumuskan IPM sebagai alat untuk memahami kesejahteraan sosial dan ekonomi di berbagai negara dengan lebih komprehensif dibanding hanya menggunakan PDB sebagai indikator tunggal (Sharma, Srivastava, & Khanna, 2023).

Di Indonesia, instansi yang bertugas dalam menghitung dan merilis angka IPM adalah BPS. Secara umum, BPS mengadopsi pengukuran pembangunan manusia UNDP. BPS selalu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang dilakukan oleh UNDP dalam penghitungan IPM, baik itu terkait dengan pembaruan indikator maupun metode penghitungan. Sejak 2015, metodologi penghitungan IPM di Indonesia telah menggunakan metode terbaru yang disempurnakan oleh UNDP pada tahun 2014, yang menjadi acuan standar dalam penghitungan IPM hingga saat ini. Dalam menetapkan indikator yang digunakan, IPM Indonesia tetap mengacu pada standar yang ditetapkan oleh UNDP. Namun, terdapat perbedaan pada salah satu indikator dari dimensi standar hidup layak yang diakibatkan oleh tidak tersedianya indikator yang sebanding dengan yang diterapkan oleh UNDP di tingkat subnasional di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (BPS, 2024).

Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, indikator yang digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau  $e_0$ . UHH merupakan estimasi rata-rata jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang untuk hidup. Indikator ini dipilih karena umur panjang dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang hanya bisa dicapai jika individu memperoleh nutrisi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Perhitungan UHH dilakukan dengan menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*) dan disesuaikan dengan standar penghitungan yang ditetapkan oleh UNDP (BPS, 2024).

Selanjutnya, terdapat dua indikator untuk dimensi pengetahuan, yaitu: i) Harapan Lama Sekolah (HLS) dan ii) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini berfungsi untuk mencerminkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah menggambarkan potensi atau peluang pendidikan formal yang dapat dicapai oleh masyarakat, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan tingkat pendidikan yang sudah diperoleh oleh sumber daya manusia di suatu wilayah. Perhitungan kedua indikator ini memanfaatkan tiga sumber data, yaitu: i) data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikumpulkan oleh BPS; ii) data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama; serta iii) hasil pengumpulan data sektoral di tingkat kabupaten/kota (BPS, 2024).

Terakhir, dimensi standar hidup layak diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Nilai ini menjadi representasi dari tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin besar peluang individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dalam konteks IPM, pengeluaran per kapita digunakan sebagai proxy untuk mengukur akses individu terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Sebagai contoh, individu dengan pengeluaran per kapita yang tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, fasilitas pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai. Sebaliknya, rendahnya pengeluaran per kapita mengindikasikan keterbatasan ekonomi yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar dan menurunkan kualitas hidup. Dengan demikian, pengeluaran per kapita menjadi salah satu komponen penting dalam mengukur dimensi standar hidup layak, sekaligus mencerminkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan manusia secara menyeluruh (BPS, 2024).

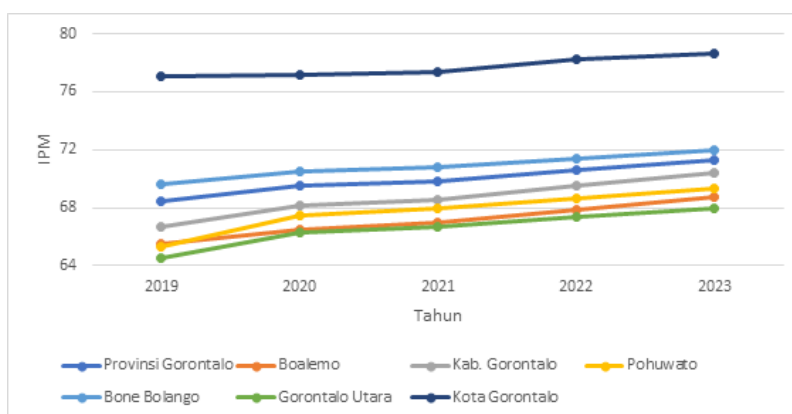
Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji angka IPM di Provinsi Gorontalo sebagai indikator pengukuran kualitas SDM, dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik yang mencakup angka IPM dan indikator dari tiga dimensi pembentuknya, yaitu usia harapan hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran per kapita di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, seperti Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo selama 5 tahun terakhir (2019–2023). Analisis data dilakukan menggunakan statistika deskriptif yang ditampilkan dalam grafik untuk membandingkan IPM antara Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, sekaligus melihat perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun. Kelebihan dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam meringkas data dengan jelas sehingga mudah dimengerti (Tarigan & Silaban, 2024), dan hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya IPM sebagai indikator kualitas SDM di Provinsi Gorontalo.

### 4. ASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Analisis Data IPM



Sumber: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik, 2023

**Gambar 1. IPM Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2019 - 2023**

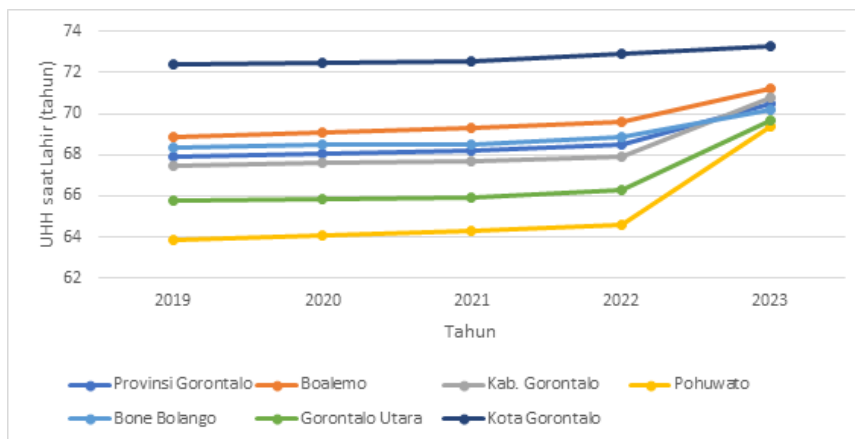
Berdasarkan grafik IPM di Provinsi Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan pada seluruh wilayah, meskipun dengan laju yang bervariasi. Kota Gorontalo mencatat nilai IPM tertinggi sepanjang periode tersebut, dengan nilai yang terus meningkat secara konsisten dari 77,08 pada tahun 2019 menjadi 78,64 pada tahun 2023. Hal

ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Di sisi lain, Kabupaten Gorontalo Utara mencatat nilai IPM terendah dibandingkan wilayah lainnya sepanjang periode yang sama, meskipun juga mengalami peningkatan dari 64,52 pada tahun 2019 menjadi 68 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pembangunan yang terus berjalan, namun masih membutuhkan perhatian lebih untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Gorontalo. Tren serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Kabupaten Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango, dengan kenaikan IPM yang stabil tetapi tetap berada di bawah Kota Gorontalo.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesenjangan antara Kota Gorontalo dengan kabupaten lain, khususnya Gorontalo Utara, mengindikasikan perlunya pemerataan pembangunan. Menurut Suryanto, Mukhlis, & Makhya (2023) hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara merata sehingga dapat mengurangi disparitas dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

## 2) Analisis Data Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir



Sumber: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 2. UHH saat Lahir Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2019 - 2023**

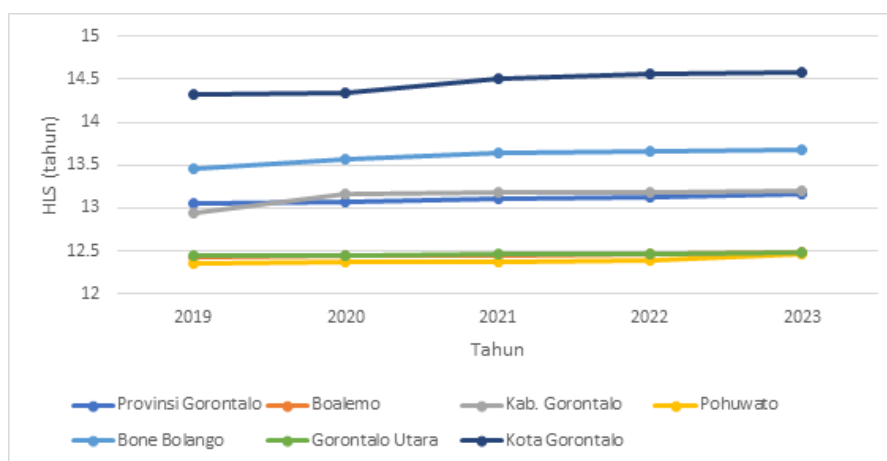
Berdasarkan grafik angka Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Provinsi Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan di seluruh wilayah, meskipun dengan tingkat kenaikan yang berbeda-beda. Kota Gorontalo mencatat angka UHH tertinggi

sepanjang periode tersebut, yakni di atas 73,25 tahun, artinya bayi yang lahir di Kota Gorontalo diharapkan hidup hingga umur 73,25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan kabupaten lain, yang dapat dikaitkan dengan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, lingkungan yang lebih sehat, serta faktor pendukung lainnya.

Di sisi lain, Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan angka UHH yang paling rendah selama lima tahun terakhir, meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Angka UHH di Gorontalo Utara meningkat dari 65,79 tahun pada 2019 menjadi 69,65 tahun pada 2023, menandakan adanya perbaikan layanan kesehatan atau kondisi hidup di wilayah tersebut. Namun, tetap ada kesenjangan yang cukup besar antara Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Gorontalo Utara.

Secara keseluruhan, tren positif pada angka UHH di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kesenjangan antara wilayah seperti Kota Gorontalo dengan kabupaten lain, terutama Gorontalo Utara dan Pohuwato, menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah daerah harus berfokus pada pemerataan akses layanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk mendorong peningkatan UHH secara merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

### 3) Analisis Harapan Lama Sekolah (HLS)



Sumber: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik, 2024

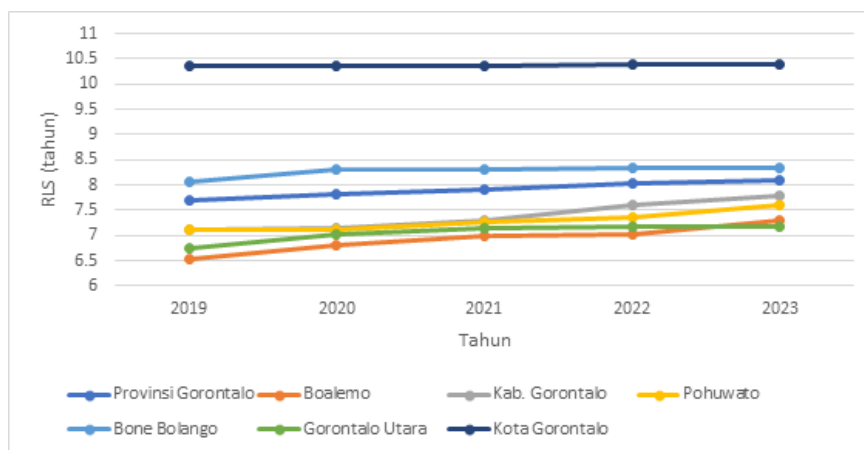
**Gambar 3. HLS Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2019 - 2023**

Berdasarkan grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan di seluruh wilayah, meskipun perbedaannya relatif kecil. Kota Gorontalo menunjukkan angka HLS tertinggi dibandingkan wilayah lain, stabil di angka 14,58 tahun pada 2023, yang mengindikasikan bahwa masyarakat di Kota Gorontalo memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan kesempatan belajar yang lebih panjang dibandingkan kabupaten lainnya.

Wilayah dengan angka HLS yang lebih rendah terlihat pada Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2019, angka HLS di kedua wilayah ini berada di kisaran 12 tahun dan hanya mengalami sedikit peningkatan hingga 2023. Meskipun ada peningkatan, kesenjangan antara kabupaten tersebut dengan Kota Gorontalo masih cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam akses terhadap fasilitas pendidikan atau kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, tren positif HLS di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya upaya peningkatan sektor pendidikan. Namun, disparitas yang cukup besar antara Kota Gorontalo dan kabupaten lainnya, terutama Gorontalo Utara, mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih terfokus pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah daerah perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pengajar, serta program beasiswa untuk mendorong partisipasi pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah.

#### 4) Analisis Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



Sumber: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 4. RLS Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2019 - 2023**

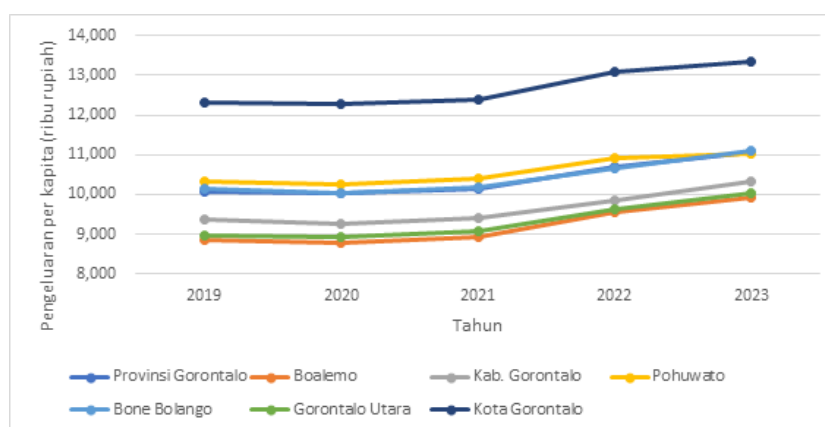


Grafik ini menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota di dalamnya dari tahun 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, RLS di tingkat Provinsi Gorontalo menunjukkan tren yang stabil di angka sekitar 8 tahun. Kota Gorontalo secara konsisten memiliki RLS tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu mencapai 10,4 tahun pada tahun 2023. Sementara kabupaten lain seperti Pohuwato dan Gorontalo Utara menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun ke tahun.

Jika diperhatikan lebih rinci, kabupaten seperti Boalemo, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo memperlihatkan tren yang serupa, dengan peningkatan RLS secara perlahan namun stabil dari sekitar 7 hingga mendekati 8 tahun selama periode 5 tahun ini. Gorontalo Utara mencatatkan RLS terendah di antara seluruh wilayah, tetapi tetap menunjukkan kemajuan positif, meskipun laju pertumbuhannya tampak lebih lambat dibandingkan wilayah lain.

Perbedaan yang signifikan antara Kota Gorontalo dan kabupaten lainnya mencerminkan kesenjangan dalam akses atau kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota Gorontalo yang berada di posisi teratas kemungkinan memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, serta aksesibilitas yang lebih tinggi bagi penduduknya dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain yang relatif lebih terpencil. Peningkatan RLS di semua wilayah ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan di Provinsi Gorontalo, meskipun masih ada ruang untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.

## 5) Analisis Pengeluaran per Kapita



Sumber: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 5. Pengeluaran per Kapita Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-  
Provinsi Gorontalo, 2019 - 2023**

Grafik ini menggambarkan perkembangan pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah) di Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota di dalamnya selama periode 2019 hingga 2023. Secara umum, Kota Gorontalo memiliki pengeluaran per kapita tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain sepanjang periode ini, mencapai sekitar 13,35 juta rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, kabupaten lainnya, seperti Gorontalo Utara dan Boalemo, memiliki pengeluaran per kapita yang lebih rendah, tetapi menunjukkan peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Pada tingkat provinsi, pengeluaran per kapita meningkat dari sekitar 10 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi mendekati 11 juta rupiah pada tahun 2023. Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango berada di posisi menengah, dengan angka pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Boalemo dan Gorontalo Utara, tetapi lebih rendah dari Kota Gorontalo. Kenaikan pengeluaran ini menunjukkan tren positif dalam kapasitas ekonomi masyarakat di semua wilayah.

Perbedaan yang mencolok antara Kota Gorontalo dan kabupaten lainnya dapat mencerminkan disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota Gorontalo, sebagai pusat ekonomi dan administratif, mungkin memiliki akses lebih baik ke sumber daya, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur ekonomi yang lebih maju, yang mendorong pengeluaran per kapita yang lebih tinggi. Meski demikian, kenaikan yang konsisten di semua wilayah menunjukkan adanya perkembangan ekonomi secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo, meskipun kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa IPM di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2019–2023, dengan Kota Gorontalo mencatat nilai IPM tertinggi yang mencerminkan kualitas pembangunan SDM lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun, kesenjangan signifikan tetap terlihat antara Kota Gorontalo dan wilayah kabupaten, terutama Gorontalo Utara, yang memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan. Dimensi kesehatan, yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, menunjukkan peningkatan di seluruh wilayah, dengan Kota Gorontalo tetap unggul. Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencatat tren positif, meskipun disparitas akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih mencolok. Sementara itu, peningkatan pengeluaran per kapita

menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun tetap mencerminkan ketimpangan yang perlu diatasi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempercepat pemerataan pembangunan melalui alokasi anggaran yang lebih besar untuk wilayah dengan IPM rendah, seperti Gorontalo Utara, dengan fokus pada investasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal melalui program beasiswa, pelatihan guru, dan pembangunan sekolah, serta peningkatan layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis, dan program gizi, perlu diprioritaskan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat secara merata, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi dan kualitas pembangunan SDM di Provinsi Gorontalo dapat meningkat secara menyeluruh.

## DAFTAR REFERENSI

- Ananda, F. R., et al. (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan pelaksana di PT Perkebunan Nusantara III (Persero). *Agrica*, 12(2), 103–109.
- Astuti, R. W. (2020). Pengaruh pendidikan, keterampilan kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. *JSMBI*, 10(1), 24–29.
- Awalia, Q. A., & Husnurrosyidah. (2024). IPM ditinjau dari kemiskinan, tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan pendapatan asli daerah eks-Karesidenan Pati. *Jebisku*, 2(2), 191–203.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia, 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fahrurozi, M., et al. (2023). Peningkatan indeks pembangunan manusia regional dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi wilayah (Studi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 70–89. <https://doi.org/10.22146/jkn.83425>
- Indriani, I. (2020). Penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak di Kecamatan Tanjung Redeb. *Eco-Build Journal*, 4(2), 64–74.
- Izah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis pengaruh tenaga kerja, tingkat upah, dan PDRB terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 2549–2284.
- Jasasila. (2020). Analisis dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jambi 2010-2019. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 389–396.

- Kapisa, M. B., Bauw, S. A., & Yap, R. A. (2021). Analisis tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap pendapatan kepala keluarga (KK) di Kampung Manbesak Distrik Biak Utara Provinsi Papua. *Lensa Ekonomi*, 15(1), 131–150.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2024). Rencana tenaga kerja jangka panjang: Menuju Indonesia Emas 2024. Available at <https://satudata.kemnaker.go.id/publikasi/118#:~:text=Guna%20mewujudkan%20Indonesia%20emas%20tahun,sebagaimana%20tersaji%20dalam%20dokumen%20ini>. Accessed on 24 December 2024.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 51–72.
- Muslimin, B., & Nursinah, N. (2023). Produktivitas kerja karyawan PT. Hidrokoloid AMJ sebagai suatu kajian kesehatan masyarakat. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 83–94. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v4i2.7924>
- Mustaqim, I., & Fauzi, A. (2022). Literature review: Analisis pengaruh perencanaan SDM, pendidikan, dan pelatihan SDM terhadap performa karyawan. *Jaman*, 2(3), 43–48.
- Novitasari, N. I., Suharno, & Arintoko. (2021). Pengaruh keluhan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 239–244.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106–114.
- Sharma, N., Srivastava, A., & Khanna, S. (2023). The state of human well-being in South Asian region: A human development index perspective. *Research Gate*, 41–53.
- Suhandi, W., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 268–283. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.28>
- Suryanto, S. D., Mukhlis, M., & Makhya, S. (2023). Studi kesenjangan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(3), 355–371.
- Tarigan, M., & Silaban, D. F. (2024). Statistika deskriptif. *Jintan: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(2), 187–195.
- United Nations. (2023). What is Goal 8 – Decent work and economic growth. Retrieved from [https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/09/Goal-8\\_Fast-Facts.pdf](https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/09/Goal-8_Fast-Facts.pdf)
- Zainob, F. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri makanan dan minuman di Kabupaten Aceh Barat. *Regress*, 1(1), 50–57.